ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK, Tentang Peralihan Hak Tanah Bengkok Yang Dialihkan ke Pihak Lain" dilatar belakangi dengan adanya peralihan hak atas tanah bengkok di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diterbitkannya sertipikat hak milik nomor: 12052 atas nama Rani Fitriana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pokok perkara tindak pidana korupsi terhadap tanah bengkok yang telah dialihkan haknya ke pihak lain terhadap peralihan hak atas tanah-tanah bengkok di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui pertimbangan dari majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK terhadap tanah bengkok yang telah dialihkan haknya kepada pihak lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian dokumenter, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Keputusan Gubernur DIY Pasal 3 Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa Menyewa Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku-buku atau literatur-literatur mengenai pertanahan, pendapat hukum, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Dan Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK mengenai status hukum tanah bengkok yang dialihkan haknya kepada pihak lain adalah benar dengan menghukum terdakwa dengan

hukuman pidana penjara dan denda uang pengganti atas kerugian yang dialami negara.

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan administrasi dan yuridis mengenai peralihan hak atas tanah bengkok karena melanggar peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peralihan Hak atas Tanah

ABSTRACT

The study titled "Analysis of the Corruption Court verdict on the Yogyakarta District Court No. 02 / Pid.Sus / 2013 / P.Tpkor YK, On The Crooked Land of Transfer of Rights Transferred to Other Party" against the background of the shift in land rights crooked in Nologaten hamlet, village Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Special Province, which has been the issuance of certificates of property rights number: 12052 in the name of Rani Fitriana.

This study aims to determine the principal corruption cases against crooked land which has the right is transferred to another party to the transfer of rights to the lands crooked in Hamlet Nologaten, Village Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Special Province, and to find out the considerations Decision of the judges in the Corruption Court in Yogyakarta District Court No. 02 / Pid.Sus / 2013 / P.Tpkor YK against crooked land rights that have been transferred to other parties.

This study uses the research is a normative juridical research approach to the specification of research is descriptive. The emphasis of this study focused on documentary research, which means more studying and reviewing secondary data obtained from the study. The data used in this research is secondary data obtained from the primary law and secondary law. Primary legal materials are materials to law, among others, of Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Affairs, Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2014 About the Village, Home Affairs Minister Regulation No. 4 Year 2007 on Guidelines for Management of Intellectual village, Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency No. 9 of 1999 on Procedures for Granting and Cancellation Rights Country Land and Rights Management, and Government Decision DIY Article 3 No. 82 Year 2003 on Guidelines for release, Appropriation Changes, Land Lease Kas village in the province of Yogyakarta. While secondary law, namely materials that explain the primary legal materials, in the form of books or literature on land issues, legal opinions, files or documents and materials from the Internet related to the problem in this study. Data collection techniques used in this study was obtained through literature and field research. And data analysis techniques in this study using qualitative data analysis.

Results of research and discussion shows that the Corruption Court Decision on the Yogyakarta District Court No. 02 / Pid.Sus / 2013 / P.Tpkor YK concerning the legal status of a crooked land which the right is transferred to another party is right to punish the defendant with a sentence of imprisonment and fines compensation for the losses suffered by state.

From the above, it can be concluded that there are administrative and legal errors concerning land rights crooked transition for violating laws and regulations that apply.

Keywords : Court of criminal acts of corruption, transfer lands of rights